

DARI OVERTOURISM MENJADI QUALITY TOURISM

Policy Brief ini Ditujukan kepada:

- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pemerintah Provinsi Bali
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali

Tim Penulis

- Maria A.P Sari
- Tri Wahyuni
- Ricky Noor Permadi

<https://puslatbangkdod.lan.go.id/>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Overtourism menjadi momok yang menakutkan bagi sebuah destinasi wisata. Terkadang *overtourism* dapat mengaburkan norma-norma sosial dan budaya, serta menyebabkan ketegangan antara turis dan masyarakat setempat. Tak terkecuali yang saat ini terjadi di Pulau Bali, sebagai salah satu destinasi wisata populer di dunia, Bali menawarkan beragam objek wisata yang memukau, hal tersebut terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat tiap harinya. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Bali tahun 2023 tidak sebanyak tahun 2019 (sebelum Covid-19), namun kondisi saat ini mengindikasikan bahwa Bali tengah menghadapi ancaman serius dari masalah *overtourism*. Bahkan media asing (CNA), menyoroti ledakan turis yang terjadi di Bali usai pandemi Covid-19 mereda. Artikel itu menyoroti betapa sudah berubahnya Bali saat ini, seperti pembangunan yang merajalela tanpa ada acuan tata kota, kepadatan penduduk ditambah pengunjung, dan kemacetan yang tidak bisa lagi dihindari. Hal tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan kualitas pariwisata Pulau Dewata (julukan Pulau Bali) semakin menurun dan menggradasi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, *Policy Brief* ini menghadirkan empat alternatif solusi kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu: membuat beberapa syarat tambahan dalam pengajuan visa wisman, *culture orientation*, membuat sistem pengawasan dan pelaporan wisman bermasalah yang lebih optimal, serta melakukan upaya pemerataan distribusi wisatawan.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, Bali mempunyai lanskap yang memukau. Ditunjang dengan budaya yang kaya, serta keramahan penduduk, berhasil membuat Bali menarik jutaan pengunjung wisatawan mancanegara (wisman) dalam setiap tahun. Pandemi Covid-19 sempat membuat pariwisata Bali lesu, namun, setelah pandemi Covid-19, wisman dari berbagai negara kembali berdatangan dan memenuhi lokasi wisata di Bali. Meskipun jumlah kunjungan wisman di Bali tahun 2023 (11,6 juta orang) masih berada jauh dari angka kunjungan wisman sebelum terjadinya pandemi Covid di tahun 2019 (16,1 juta orang), namun Bali saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa *overtourism*.

Menurut UNWTO (Betsabe et al, 2022), *overtourism* adalah dampak pariwisata terhadap suatu destinasi, atau bagian dari destinasi tersebut, yang secara berlebihan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan/atau kualitas pengalaman pengunjung wisatawan secara negatif. Definisi tersebut menunjukkan bahwa *overtourism* tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas namun juga kualitas yang diakibatkan dari kegiatan pariwisata. Kondisi *overtourism* tersebut terjadi saat ini di Bali. Meskipun jumlah kunjungan wisman masih jauh dari angka wisman di tahun 2019, namun masalah sosial yang disebabkan oleh wisman semakin meningkat. Bahkan media asing telah banyak mengomentari tentang *overtourism*. *CNN International* menilai Bali sebagai salah satu destinasi wisata dengan *overtourism* terburuk pada 2023, sedangkan *Channel News Asia* yang membahas tantangan baru Bali karena *overtourism*, yang berakibat suasana di Pulau Dewata tidak lagi sesantai dan sebebaskan dulu (CNN, 2023).

Oleh karena itu, *overtourism* yang saat ini menjadi masalah di Pulau Bali perlu mendapat sentuhan kebijakan secara spesifik, agar tidak memicu sikap anti *tourism* seperti yang telah terjadi di beberapa negara. Kasus *overtourism* di Santorini, membuat Walikota Santorini mengusulkan pembatasan jumlah penumpang kapal pesiar per hari. Usulan ini didukung oleh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dan direncanakan diberlakukan pada tahun 2025. Bahkan, protes anti-pariwisata telah menjadi isu panas di Eropa, termasuk di Spanyol dan Belanda. Venesia baru-baru ini membatasi jumlah wisatawan dalam satu kelompok menjadi 25 orang (Kompas, 2024). Bahkan beberapa kota di Eropa seperti Amsterdam dan Kopenhagen berencana menyembunyikan tempat-tempat wisata utama dengan mengarahkan turis menjauh dari tempat-tempat wisata dan destinasi populer (Tempo.co, 2024).

kumparan travel, 25 Juni 2024

Seorang WNA dengan menggunakan truk dalam kondisi mabuk menerobos ke terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai merusak fasilitas bandara seperti portal masuk dan tiang pembatas

kompas.com, 17 April 2023,

Wisman berfoto nyaris tanpa busana di pohon suci berusia 700 tahun, di Pura Babakan, desa adat Bayan, Tabanan

CNN, Mei 2023

Ramai orang Rusia Invasi Bali, Muncul Fenomena Aneh-Aneh

kompas.com, 17 April 2023

Pelanggaran yang dilakukan wisman cukup beragam, mulai dari melawan polisi, tidak menghormati adat Bali, hingga bekerja atau membuka usaha.

DESKRIPSI MASALAH

Setidaknya terdapat beberapa penyebab masalah sosial yang timbul dari overtourism:

01. Wisman yang datang tidak memiliki finansial yang memadai

Kondisi ini tentu memicu beberapa masalah sosial baik bagi wisman itu sendiri, maupun bagi masyarakat serta ekonomi lokal. Banyak wisman yang memiliki visa turis justru menggantungkan hidupnya di Bali (CNBC, 2023). Desainer dan politisi asal Bali Ni Luh Djelantik mengatakan bahwa Wisman di Bali dikabarkan telah merambah kepada bidang usaha yang selama ini banyak dilakukan warga Bali (Liputan6.com, 2024), seperti *guide*, *broker*, konsultan, guru, serta penyewaan sepeda motor. Bahkan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Ray Suryawijaya mengungkapkan bahwa kondisi itu kian masif setelah perang antara Rusia-Ukraina.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali (2023)

Ramai orang Rusia Invasi Bali, Muncul Fenomena "Turis dari Rusia memang meningkat, kenapa? karena dia menghindari konflik di negaranya karena perang Rusia-Ukraina masih berkecamuk. Kedua menghindari wajib militer, ketiga mereka eksodus "mencari hidup" ke Asian country favorit seperti Thailand, Vietnam dan termasuk Bali"

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2023)

"Jadi permasalahan utama terkait orang asing di Bali adalah banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) dengan pengeluaran rendah yang sering berbuat onar"

Kemudian, di Bali juga terkenal dengan peluang kerja yang tinggi. Pemantauan beberapa media yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa wisman beranggapan mencari uang di Bali dengan menjual jasa cukup mudah. Kebanyakan mereka menjual jasa mereka seperti penyewaan motor dan pelatih selancar kepada wisman yang berasal dari negara yang sama. Mereka beranggapan warga lokal tidak cukup cakap berbahasa asing sehingga menjadi peluang kerja bagi wisman (BBC, 2023; Kompas, 2023).

Kondisi ini juga diperparah dengan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas wisman selama di Bali. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyatakan maraknya wisatawan mancanegara yang bekerja secara ilegal di di Bali sudah menjadi persoalan besar. Tidak hanya melanggar aturan keimigrasian, mereka juga merampas lapangan kerja warga lokal. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah kurang tegas menerapkan aturan terkait warga negara asing yang berlibur di Tanah Air. Akhirnya, para pelancong itu bisa leluasa mencari nafkah meskipun hanya mengantongi visa turis (Media Indonesia, 2023).

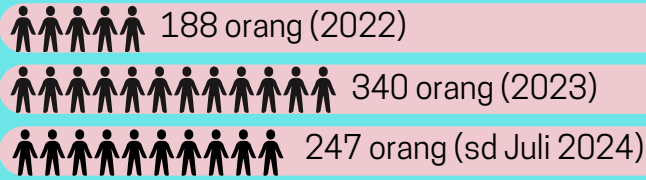
02. Minimnya kepatuhan wisman serta tidak semua wisman memahami *do and don't* selama di Bali.

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan kartu *do and don't* bagi wisman selama di Bali, yang langsung diberikan oleh petugas imigrasi saat pemeriksaan paspor. Selain itu, wisman juga diwajibkan memindai QR code yang disediakan, sehingga aturan ini juga ada di *HP* wisman (Tribunbali, 2023). Namun, banyak pelanggaran sosial yang terjadi di Bali diakibatkan ketidaktahuan wisman terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di Bali. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu.

Selain itu minimnya kepatuhan wisman terhadap aturan yang ada juga menjadi masalah tersendiri. Kondisi ini digambarkan dari semakin meningkatnya angka wisman yang dideportasi dari Bali. Sehingga, meskipun pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui upaya deportasi bagi wisman yang bermasalah, namun ternyata masalah sosial yang dilakukan oleh wisman kerap kali muncul (kumparantravel.2024).



Jumlah Wisman yang telah dideportasi (liputan 6, 2024)



Pakar strategi pariwisata, Taufan Rahmadi juga menegaskan bahwa kasus wisman nakal yang marak di Bali, adalah alarm bagi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Alarm ini, menguji tekad pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata berkualitas. Upaya deportasi dan sikap tegas terhadap wisman, adalah bagian dari upaya menjaga pariwisata berkualitas di destinasi pariwisata, khususnya Bali. Namun, upaya itu juga perlu diimbangi sosialisasi yang masif. (VoA, 2024).

03. Distribusi wisatawan di Bali tidak merata

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemyayun bahwa Bali Selatan menjadi salah satu daerah Bali yang dikatakan mengalami penumpukan wisatawan. Pemyayun menjelaskan penumpukan wisatawan itu terjadi karena beberapa alasan, yakni *amenities* dan *services* yang terkonsentrasi di Bali Selatan, seta banyaknya kawasan pantai di daerah selatan yang menjadi destinasi wisatawan (detiktravel, 2023).

Kondisi ini juga diaminakan oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya. Menurutnya perlu dicari faktor penyebab mengapa penyebaran wisatawan terkonsentrasi di selatan Bali (CNN, 2024).

04. Longgarnya syarat masuk wisman ke Indonesia

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) melalui surat edaran Nomor IMI-0018.GR.01.01 tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian mengenai Layanan Visa Kunjungan saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival*/ E-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* tahun 2019. Dalam surat edaran tersebut syarat pemberian VoA adalah paspor, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, serta bukti pembayaran PNPB visa kunjungan saat kedatangan. Syarat ini dianggap terlalu longgar, sehingga berdampak terhadap kualitas wisman yang masuk ke Indonesia.

Gubernur Bali I Wayan Koster menyebutkan bahwa banyak turis asing nakal di Bali merupakan konsekuensi dari kelonggaran penerapan *Visa On Arrival* (VoA) atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Meskipun dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, namun kebijakan tersebut berdampak terhadap munculnya berbagai persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan di Bali (Kompas, 2023).

ALTERNATIF SOLUSI

Untuk memastikan wisman yang datang ke Bali berkualitas serta memberikan dampak positif, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

#01 Membuat beberapa syarat tambahan dalam pengajuan visa wisman

persyaratan finansial bagi wisman yang akan masuk ke Indonesia. Syarat yang dimaksud bisa berupa rekening koran minimal selama tiga atau enam bulan atau jumlah tabungan minimal yang harus dimiliki wisman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa wisman tersebut memiliki cukup dana untuk mendukung diri mereka sendiri selama di Indonesia. Kedua, persyaratan kepastian selama menetap. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti *booking* tempat tinggal serta *itinerary* selama berada di Bali.

Kedua persyaratan tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya *quality tourism*. Kecukupan dana, kepastian akomodasi serta kejelasan kegiatan mereka selama di Bali dapat membantu mengurangi risiko wisman yang berniat untuk tinggal lebih lama dari yang diizinkan atau bahkan berusaha untuk bekerja secara ilegal.

#02 Culture orientation

Memberikan orientasi budaya bagi wisman sebelum ke Indonesia, khususnya di Bali menjadi langkah penting untuk membantu wisman memahami dan menghormati budaya, adat istiadat dan norma yang berlaku. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan adalah pertama, pada *official e-visa website* for Indonesia sebaiknya termuat informasi terkait *do and don't* untuk wisman selama berada di Bali. Upaya ini dilakukan agar pada saat wisman mengajukan visa, informasi tersebut sudah tersampaikan ke mereka. Selain itu informasi ini juga menjadi syarat wajib untuk mereka unduh sebelum mereka mengajukan visa masuk ke Indonesia. Selain itu perlu juga disebutkan sanksi yang akan mereka terima apabila melakukan pelanggaran selama wisata di Indonesia.



Kedua, pemerintah menggandeng maskapai dalam melakukan sosialisasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menampilkan video-video atraktif selama di pesawat, terkait tempat wisata di Bali, serta apa saja yang harus mereka perhatikan ketika mengunjungi daerah wisata tersebut. Diharapkan video ini dapat menjadi wahana promosi wisata sekaligus sosialisasi adat dan budaya lokal Bali.

#03 Membuat sistem pengawasan dan pelaporan wisman bermasalah yang lebih optimal.

Pertama, baik pemerintah daerah maupun pusat agar dapat membuat sistem pelaporan wisman bermasalah, yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah (baik berupa aplikasi ataupun *call center* yang tidak berbayar). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi wisman yang berulah. Selain itu upaya ini juga dilakukan untuk meminimalisir unggahan masyarakat di media sosial terkait ulah wisman, agar tidak berdampak negatif terhadap citra pariwisata Bali.

Kedua, penguatan peran komunitas pariwisata. Komunitas dapat menjadi wadah yang lebih progresif dalam mengawal pengaduan terkait wisman yang berulah, karena biasanya komunitas memiliki akses ke layanan pengaduan yang lebih cepat dan sistematis. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas komunitas pariwisata antara lain seperti pelatihan bagaimana penanganan wisman bermasalah, serta dukungan infrastruktur lainnya yang membantu dalam melakukan pengawasan wisatawan.

#04 Melakukan upaya pemerataan distribusi wisatawan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah pertama regulasi arus wisatawan, yakni dengan membatasi wisatawan yang masuk ke tempat wisata. Langkah ini dapat diupayakan dengan memberlakukan sistem reservasi tiket masuk secara *online*.

Kedua, membuat paket promosi dengan memberikan harga khusus bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke beberapa tempat. Upaya ini diharapkan dapat memperkenalkan daerah wisata lainnya yang ada di Bali, maupun di luar daerah Bali, seperti Lombok. Agar optimal, strategi pemerataan distribusi wisatawan ini perlu diikuti dengan sosialisasi yang masif dengan menggandeng pelau agen perjalanan, hotel, *tour guide*, komunitas pariwisata serta *influencer*.

REKOMENDASI

Ditengah semakin populernya pulau dewata sebagai tujuan wisata mancanegara, terdapat permasalahan yang tidak dapat dianggap remeh, yaitu masalah *overtourism* yang kini “menghantui” kehidupan pariwisata di pulau bali. Untuk mengatasi permasalahan *overtourism* tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif dan strategis. Pada fase jangka pendek, pemerintah dapat melakukan penyempurnaan kebijakan mengenai turis asing dengan menekankan aspek persyaratan visa melalui verifikasi keuangan dan rencana perjalanan, sehingga dapat memastikan bahwa wisatawan mancanegara yang datang memiliki kualitas dan niat yang baik. Kedua, *Culture orientation*, yaitu dengan memberikan orientasi budaya bagi wisman sebelum ke Indonesia, khususnya di Bali menjadi langkah penting untuk membantu wisman memahami dan menghormati budaya, adat istiadat dan norma yang berlaku. Ketiga, optimalisasi sistem pelaporan dan pengawasan wisatawan yang bermasalah. Sedangkan pada fase jangka panjang untuk mencegah kepadatan di destinasi tertentu, pemerataan distribusi wisatawan dapat dilakukan melalui regulasi arus wisata dan promosi paket wisata ke daerah lain, termasuk wilayah di luar Bali, seperti Lombok. Strategi ini perlu didukung oleh kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- balipost.com.2024. Industri Pariwisata Bali Minta Syarat Kedatangan Wisman Diperketat. 2024. Retrieved from <https://www.balipost.com/news/2024/06/12/404052/Industri-Pariwisata-Bali-Minta-Syarat...html>
- bbc.com. Pengakuan turis asing bekerja secara ilegal di Bali, 'ilegal, tentu saja saya mengerti'. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64863560>
- cnbc.com. 2023. Rusia 'Invasi' Bali, Turis Rusia Jadi Broker Sampai Dokter. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230504165130-4-434544/rusia-invasi-bali-turis-rusia-jadi-broker-sampai-dokter>
- cnnindonesia.com. 2024. Overtourism atau Bukan, Bali harus Berbenah. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240423021742-269-1089224/overtourism-atau-bukan-bali-harus-berbenah>
- detik.com. 2023. Dirjen Imigrasi Ungkap Penyebab Maraknya Bule Nakal di Bali. Retrieved from <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6833615/dirjen-imigrasi-ungkap-penyebab-maraknya-bule-nakal-di-bali>
- kompas.id. 2023. WNA Leluasa Bekerja secara Ilegal di Bali. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/wna-leluasa-bekerja-secara-ilegal-di-bali>
- liputan6.com.2024. Tak Hanya Sering Berulah, Ni Luh Djelantik Ungkap Wisman Juga Menyaingi Usaha Warga Lokal. Retrieved from <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5628958/tak-hanya-sering-berulah-ni-luh-djelantik-ungkap-wisman-juga-menyaingi-usaha-warga-lokal?page=4>
- voaindonesia. 2023. Deportasi Wisman Berlanjut, Pemerintah Diminta Perketat Syarat Masuk. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/deportasi-wisman-berlanjut-pemerintah-diminta-perketat-syarat-masuk-/7053421.html>

